**KATA PENGANTAR**

Hanya kepada Allah SWT segala puji dipanjatkan, atas kemudahan yang telah diberikan sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026 telah selesai disusun sesuai dengan waktunya.

Penyusunan Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. dan telah berpedoman serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2021-2026.

Renstra ini disusun untuk menentukan arah dan tujuan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menuju *good governance*. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan dapat lebih berhasil guna, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai serta sebagai bentuk transparansi terhadap pelayanan publik.

Rencana Strategis bertujuan untuk menerjemahkan visi dan misi Kota Depok ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama Tahun 2021-2026 yang disertai dengan program prioritas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Strategis ini belum lengkap dan sempurna. Oleh karenanya segala kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan pada penyusunan Renstra periode berikutnya.

Akhir kata, semoga Renstra ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan dalam pencapaian visi misi DKUM selama kurun waktu lima tahun ke depan dapat terwujud.

Depok, April 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK**

**H. MOHAMMAD FITRIAWAN, ST, MT**

**NIP. 19691210 199803 1 002**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **LATAR BELAKANG**

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah (PD) untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra menggambarkan wujud pelayanan yang diberikan oleh PD kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi selama 5 (lima) tahun.

Fungsi Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026 adalah:

1. sebagai landasan operasional pelaksanaan RPJMD;
2. sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD,
3. sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan OPD,

Renstra juga sebagai landasan materi dalam penyusunan kontrak kinerja kepala PD dengan Kepala Daerah dalam mewujudkan layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik lokal, nasional, dan global yang terintegrasi dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, perencanaan strategis diperlukan sinergitas sehingga visi dan misi dapat diselaraskan dengan potensi dan kendala yang sedang dan/atau akan dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

* 1. **LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026 berlandaskan pada:

1. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro/LKM;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
13. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023;
21. Peraturan Gubernur JawaBarat Nomor 53 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM;
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2012-2032;
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok;
25. Peraturan Walikota Depok Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
26. Peraturan Daerah Kota Depok No. .... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok tahun 2021-2026.
	1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok adalah tersedianya program dan kegiatan yang dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat;

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi umum sumberdaya yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, seperti sumber daya keuangan, budaya kerja dan SDM, serta prasarana dan sarana;
2. Menyusun dokumen perencanaan guna menentukan prioritas kebijakan yang memuat landasan yang koheren dan kokoh sebagai acuan penyusunan strategi, sasaran, program dan kegiatan guna perbaikan kinerja Koperasi dan usaha mikro sesuai Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok.
3. Merumuskan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam lima tahun ke depan; dan
	1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK

Bab ini memuat tugas fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang peluang pengembangan pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Depok terpilih, telahaan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan program daerah yang menunjang pencapaian sasaran sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun, disertai dengan pendanaannya yang bersifat indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaiannya.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan Renstra.

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA DEPOK**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai satu urusan wajib pelayanan non dasar yaitu: Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

**2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI OPD**

**2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok : memimpin, merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang koperasi dan usaha mikro yang meliputi urusan Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro, Bidang Pengawasan dan Bina Usaha dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

 Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan umum Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro;
4. Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
5. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan Asset;
6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Anggaran;
7. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro kota Depok, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Kepala Dinas**

**Sekretaris**

**Sub Bag**

**Keuangan**

**Sub Bag**

**Umum, Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan**

**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Bidang**

**Pengawasan dan Bina Usaha**

**Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia**

**Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro**

**Seksi**

**Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro Pasar**

**Seksi**

**Pemberdayaan Usaha Mikro**

**Seksi**

**Kelembagaan Koperasi**

**Seksi**

**Bina Usaha Koperasi**

**Seksi**

**Pengembangan Usaha Mikro**

**Seksi**

**SDM Koperasi dan Usaha Mikro**

**UPTD**

**Gambar 2.1.** Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok

**Susunan Organisasi Dinas terdiri atas**

1. **Kepala Dinas;**
2. **Sekretariat, terdiri dari :**
	1. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;dan
	2. Sub Bagian Keuangan.
3. **Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia membawahi 2 (dua) Seksi, terdiri dari :**
	1. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
	2. Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro.
4. **Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro membawahi 2 (dua) Seksi, terdiri dari :**
	1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
	2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.
5. **Bidang Pengawasan dan Bina Usaha membawahi 2 (dua) Seksi, terdiri dari :**
	1. Seksi Pengawasan ;dan
	2. Seksi Bina Usaha.
6. **Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan**
7. **Kelompok Jabatan Fungsional.**

Adapun rincian Tugas dan Fungsi dari Kepala Dinas, Sekretariat serta masing – masing bidang adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas,**

Mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan urusan pada bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah.

 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. perumusan kebijakan umum Koperasi dan Usaha Mikro;

c. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Koperasi dan Usaha Mikro;

d. pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

e. penyelenggaraan administrasi keuangan dan Asset;

f. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Anggaran;

g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;

h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Produk Hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

**2. Sekretaris Dinas**

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan Administrasi umum, pengkoordinasiaan perencanaan dan evaluasi serta Pengelolaan Keuangan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyusunan Program Kerja Sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
2. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
3. penyelenggaraan administrasi umum;
4. penyusunan evaluasi dan laporan;
5. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah kesekretariatan;
6. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
7. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
8. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
9. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan Asset Dinas;
10. Pengelolaan Keuangan Dinas;
11. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
12. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
13. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan evaluasi pelaporan kegiatan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, **Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** , mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
2. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan perencanaan, evaluasi serta pelaporan;
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian;
4. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
5. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler,
6. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
7. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
8. Pengelola perpustakaan Dinas;
9. Pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang
10. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
11. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja Dinas;
12. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan perkembangan kinerja Dinas;
13. Penyusunan Renstra Dinas;
14. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas;
15. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
16. Penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
17. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Dinas;
18. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
19. Pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas nya yang diberikan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
2. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
3. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan;
4. penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
5. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;

pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris

**3. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kelembagaan dan SDM.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dmaksud, Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mengacu pada Rencana Sstrategi Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
3. pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
4. pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam Wilayah Kota;
5. pelaksanaan rencana kegiatan Pembangunan dan pengembangan kelembagaan dan SDM koperasi dan Usaha Mikro;
6. pelaksanaan kegiatan pendidikan pelatihan, pembinaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro;
7. Pemberian dan penerbitan izin usaha simpan pinjam bagi koperasi simpan pinjam dan Unit simpan pinjam dalam wilayah kota;
8. pemberian fasilitasi pengesahan, pembukaan kantor cabang dan pengumuman Koperasi dalam Wilayah Kota;
9. penyiapan bahan penyusunan pedoman pengembangan Sumber daya manusia koperasi dan Usaha Mikro melalui penerbitan buku-buku kurikulum/ panduan Pendidikan dan pelatihan;
10. pemberian fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD/ART yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam Wilayah Kota;
11. pemberian fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman Pemerintah di tingkat kota;
12. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan dalam Wilayah Kota;
13. pemberian fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran koperasi dalam Wwilayah Kota;
14. pemberian sanksi administratif kepada Koperasi dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya;
15. pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi dalam Wilayah Kota;
16. pemberian bimbingan dan kemudahan Koperasi dalam Wilayah Kota;
17. perlindungan kepada koperasi dalam Wilayah Kota;
18. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro di tingkat Kota;
19. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari :

a. Seksi Kelembagaan Koperasi;

b. Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro.

***Seksi Kelembagaan Koperasi***

Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan koperasi.

Fungsi :

1. penyusunan rencana kerja seksi kelembagaan koperasi mengacu pada rencana kerja bidang kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
2. pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan;
3. pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dibidang koperasi;
4. sosialisasi atas permohonan pendirian koperasi;
5. penelitian permohonan akta pendirian, izin usaha simpan pinjam dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
6. pengajuan permohonan Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dan pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi;
7. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan koperasi;
8. pelaksanaan pembinaan administrasi organisasi koperasi;
9. pelaksanaan kegiatan penilaian koperasi berkualitas;
10. pelaksanaan pembinaan rapat anggota;
11. pelaksanaan laporan kelembagaan atas perkembangan koperasi;
12. pelaksanaan pembuatan database system manajemen informasi koperasi;
13. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis koperasi;
14. pelaksanaan kegiatan revitalisasi koperasi;
15. pelaksanaan kegiatan penyebaran model pola pengembangan koperasi;
16. pelaksanaan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
17. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

***Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro***

Seksi Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi sumber daya manusia koperasi dan usaha Mikro.

Fungsi :

1. penyusunan rencana dan petunjuk teknis di bidang pembinaan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro mengacu pada program kerja bidang;
2. pelaksanaan rencana dan petunjuk teknis di bidang pembinaan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro;
3. pelaksanaan pengembangan Sumber daya Manusia koperasi dan usaha mikro melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
4. penyusunan pedoman pengembangan Sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro melalui penerbitan buku-buku kurikulum/ panduan pendidikan dan pelatihan;
5. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro;
6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro**

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, Bidang Bina UMKM mempunyai fungsi yaitu :

1. penyusunan rencana kerja Bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro mengacu pada Rencana Strategi Dinas;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
3. penyusunan bahan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
4. pelaksanaan seleksi pemberdayaan wirausaha dan pengembangan usaha mikro;
5. pelaksanaan pengelolaan data usaha mikro;
6. pelaksanaan kemitraan pengembangan usaha mikro;
7. pelaksanaan promosi pengembangan usaha mikro;
8. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi usaha mikro;
9. pelaksanaan peningkatan pengembangan skala usaha mikro ke usaha kecil;
10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
11. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan pengembangan usaha mikro;
12. pelaksanaan kajian terhadap lokasi/sentra ekonomi usaha mikro;
13. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro terdiri dari :

* + 1. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro;
		2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro.

***Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro***

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan melaksanakan fasilitasi pemberdayaan.

Fungsi :

1. penyusunan program kerja Seksi Pemberdayaan usaha mikro mengacu pada program kerja bidang;
2. perumusan kebijakan teknis seksi pemberdayaan usaha mikro;
3. penyusunan bahan pemberdayaan usaha mikro;
4. pelaksanaan seleksi pemberdayaan wirausaha;
5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pemberdayaan usaha mikro;
6. pelaksanaan pengelolaan data usaha mikro;
7. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

***Seksi Pengembangam Usaha Mikro***

Seksi Pengembangan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan usaha mikro.

Fungsi :

1. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Usaha Mikro mengacu pada program kerja bidang;
2. perumusan kebijakan teknis seksi pengembangan usaha mikro;
3. penyusunan bahan pengembangan usaha mikro;
4. pelaksanaan kemitraan pengembangan usaha mikro;
5. pelaksanaan promosi pengembangan usaha mikro;
6. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sertifikasi usaha mikro;
7. pelaksanaan peningkatan pengembangan skala usaha mikro ke usaha kecil;
8. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seksi pengembangan usaha mikro;
9. pelaksanaan fasilitasi akses permodalan pengembangan usaha mikro;
10. pelaksanaan kajian terhadap lokasi/sentra ekonomi usaha mikro;
11. pelaksanaan bimbingan teknis dan standarisasi sertifikasi usaha mikro;
12. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**5. Bidang Pengawasan dan Bina Usaha**

Bidang Pengawasan dan Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan bina usaha serta evaluasi dan pengendalian Koperasi dan Usaha Mikro. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan dan Bina Usaha mempunyai fungsi yaitu :

1. penyusunan rencana kerja bidang pengawasan dan bina usaha mengacu pada rencana strategi dinas;
2. perumusan kebijakan teknis pengawasan koperasi dan usaha mikro serta bina usaha koperasi;
3. pelaksanaan koordinasi pengawasan koperasi dan usaha mikro serta bina usaha koperasi;
4. pelaksanaan pengawasan koperasi terhadap penggunaan Badan Hukum koperasi, pemberian izin Badan Hukum, pemberian izin KSP/USP, pembukaan Kantor cabang, perubahan Anggaran Dasar / anggaran rumah tangga koperasi, pembubaran, peleburan dan penggabungan koperasi, hak anggota dan kewajiban Pengurus Koperasi, dan pembukuan koperasi;
5. pelaksanaaan pengawasan bina usaha koperasi terhadap pemanfaatan badan hukum koperasi, fasilitasi akses permodalan dan jaringan usaha koperasi;
6. pelaksanaan pengawasan usaha mikro terhadap penggunaan izin, pemanfaatan sarana dan prasarana, penggunaan permodalan dan pola pemberdayaan yang diberikan / disediakan / difasilitasi / dilindungi oleh Pemerintah Daerah;
7. pelaksanaan penertiban, fasilitasi dan koordinasi penyelesaian pelanggaran di bidang koperasi dan usaha mikro;
8. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan pemberian perizinan standar/rekomendasi/ dokumen Hukum oleh petugas dinas pada koperasi dan usaha mikro;
9. pelaksanaan pemberian pertimbangan/saran /rekomendasi kepada pimpinan atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian koperasi dan usaha mikro;
10. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan pemeriksa /pengawas eksternal/internal Pemerintah;
11. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian oleh pelaku usaha koperasi dan usaha mikro;
12. penyiapan bahan laporan dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi bidang pengawasan dan bina usaha mikro;
13. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengawasan dan Bina Usaha terdiri dari :

a. Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;

b. Seksi Bina Usaha Koperasi.

***Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro***

Seksi Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di bidang perkoperasian dan Usaha Mikro.

Fungsi :

1. penyusunan rencana kerja seksi pengawasan koperasi dan usaha mikro mengacu pada rencana kerja bidang;
2. pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan koperasi dan usaha mikro;
3. pelaksanaan koordinasi pengawasan koperasi dan usaha mikro;
4. pelaksanaan pengawasan koperasi antara lain meliputi pengawasan penggunaan badan hukum koperasi, pelaksanaan anggaran dasar / anggaran rumah tangga koperasi, kegiatan koperasi, hak anggota dan Kewajiban pengurus koperasi, dan pembukuan koperasi;
5. pelaksanaan pengawasan usaha mikro antara lain meliputi pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan izin, pemanfaatan sarana dan Prasarana, penggunaan permodalan, dan pola kemitraan yang diberikan / disediakan / difasilitasi / dilindungi oleh Pemerintah Daerah pada usaha mikro;
6. pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan pemberian perizinan standar/rekomendasi/dokumen Hukum oleh petugas Dinas pada koperasi dan usaha mikro;
7. pemberian pertimbangan/saran/rekomendasi kepada pimpinan atas pelanggaran yang ditemukan dari pengawasan dan pengendalian koperasi dan usaha mikro;
8. fasilitasi dan koordinasi dengan pemeriksa/pengawas eksternal/internal pemerintah;
9. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawas dan pengendalian oleh pelaku usaha koperasi dan usaha mikro;
10. penyiapan bahan laporan yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi;
11. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

***Seksi Bina Usaha Koperasi***

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaandan bimbingan usaha koperasi.

Fungsi :

* 1. penyusunan rencana kerja seksi bina usaha koperasi mengacu pada rencana kerja bidang;
	2. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan usaha koperasi;
	3. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak disektor jasa, simpan pinjam, produksi, pemasaran dan konsumen;
	4. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha simpan pinjam /unit simpan pinjam/ koperasi simpan pinjam pembiayaan Syariah;
	5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam upaya pengembangan usaha koperasi;
	6. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha melalui jaringan usaha koperasi;
	7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha dan pengembangan permodalan koperasi;
	8. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan laporan keuangan koperasi;
	9. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

 Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang koperasi dan usaha mikro dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

**7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan.

* 1. **SUMBER DAYA**

Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

**2.2.1 Sumber daya Manusia (SDM)**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sampai saat ini (data per Januari 2021) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok memiliki sumber daya aparatur sebanyak 60 orang. Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut terdiri dari:

* Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 34 Orang (67%)
* Jumlah Non PNS : 26 Orang (33%)

**Gambar 2.2.** Grafik Komposisi PNS Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Tabel a. Data PNS berdasarkan Jenis Kelamin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah Pegawai** |
| 1. | Laki – Laki | 20 Orang |
| 2. | Perempuan  | 14 Orang |
|  | **Jumlah** | **34 Orang** |

Tabel b. Data Pegawai berdasarkan status

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Status Pegawai** | **Jumlah Pegawai** |
| 1. | PNS | 34 Orang |
| 2. | NON PNS | 26 Orang |
|  | **Jumlah** | **60 Orang** |

Tabel c. Data PNS berdasarkan tingkat pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tingkat Pendidikan** | **Jumlah Pegawai** |
| 1. | Pasca Sarjana / S2 | 5 Orang |
| 2. | Sarjana / S1 | 18 Orang |
| 3. | Sarjana Muda / D3 | 5 Orang |
| 4. | SMU / SLTA | 6 Orang |
| 5. | SMA / SLTP | 0 Orang |
|  | **Jumlah** | **34 Orang** |

 Tabel d. Data PNS berdasarkan golongan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Golongan** | **Jumlah Pegawai** |
| 1. | Golongan IV |  6 Orang |
| 2. | Golongan III | 25 Orang |
| 3. | Golongan II |  3 Orang |
| 4. | Golongan I |  0 Orang |
|  | **Jumlah** | **34 Orang** |

Tabel d. Data Pegawai berdasarkan jabatan struktural

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Jabatan Struktural** | **Jumlah Pegawai** |
| 1. | Eselon IIb | 1 Orang |
| 2. | Eselon IIIa | 1 Orang |
| 3. | Eselon IIIb | 3 Orang |
| 4. | Eselon IVa | 8 Orang |
| 5 | Eselon IVb | 0 Orang |
|  | **Jumlah** | **13 Orang** |

 Tabel e. Data Pegawai berdasarkan pendidikan penjenjangan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Pendidikan Penjenjangan** | **Jumlah Pegawai** |
| 1. | Diklat Pim II | 1 Orang |
| 2. | Diklat Pim III | 5 Orang |
| 3. | Diklat Pim IV |  13 Orang |
|  | **Jumlah** | **12 Orang** |

 Tabel f. Data PNS Per Bidang / Sekretariat dan UPT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Bidang** | **Jumlah Pegawai** |
| 1. | Sekretariat  | 10 Orang |
| 2. | Bidang Kelembagaan dan SDM |  8 Orang |
| 3. | Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro | 9 Orang |
| 4. | Bidang Pengawasan dan Bina Usaha |  5 Orang |
|  | **Jumlah** |  **34 Orang** |

 **2.2.2 Sarana dan Prasarana**

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menempati kantor di Komplek Balaikota Depok Gedung Dibaleka II Lantai 7.

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk 4 Bidang tersebut, telah dilengkapi berbagai peralatan dan perlengkapan kerja. Peralatan dan perlengkapan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok apabila dikonversi ke aset bernilai sebesar Rp 4.347.407.744,12. Rincian jumlah aset dan nilainya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4.** Jumlah Aset Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Per 31 Desember 2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Gol.** | **Kode Bidang Barang** | **Uraian** | **Jumlah Satuan / Volume** |  **Nilai ( Rupiah )**  | **Ket** |
| 1 | 01 | 01 | **TANAH** |  |  | m² | Rp 0 |   |
| 2 | 02 |   | **PERALATAN DAN MESIN** |  |  |  |  |   |
|   |   | 02 | Alat-alat Angkutan |  | 62 | unit | Rp 750.200.008 |   |
|   |    | 05 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga |  | 442 | unit |  Rp 1.078.962.252 |   |
|   |    | 06 | Alat Studio dan Komunikasi |  | 48 | unit | Rp 209.472.176 |   |
|   |    | 08 | Alat-alat Laboratorium |  | 1 | unit | Rp 9.790.000 |   |
|  |  | 10 | Komputer |  | 104 | unit | Rp 594.263.308 |  |
| 3 | 03 |   | **GEDUNG DAN BANGUNAN** |  |  |  |  |   |
|   |    | 01 | Gedung |  | 125 | m² | Rp 1.704.720.000 |   |
| 4 | 04 |   | **JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN** |  |  |  |  |   |
|   |    | 13 | a. Jalan dan Jembatan |  | 1 |  | Rp 0 |   |
|   |    | 14 | b. Bangunan Air/Irigasi |  | 3 |  | Rp 0 |   |
|   |    | 15 | c. Instalasi |  | 2 |  | Rp 0 |   |
|   |    | 16 | d. Jaringan |  | 3 |  | Rp 0 |   |
| 5 | 05 |   | **ASET TETAP LAINNYA** |  |  |  |  |   |
|   |    | 05 | Tanaman |  | 31 |  | Rp 0 |   |
| 6 | 06 | 20 | **KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN** | unit | - | m² | Rp - |   |
|  |  |  | **TOTAL** |  |  |  | **Rp 4.347.407.74,12** |  |

* 1. **Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**
		1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Dinas sesuai Koperasi dan Usaha Mikrodengan Tugas dan Fungsi adalah membantu Kepala Daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat bidang Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang ada di Kota Depok.

Capaian Kinerja Pelayanan OPD berdasarkan pelaksanaan Renstra Tahun Anggaran **2016-2020** dapat digambarkan sesuai tabel berikut :



* + 1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk capaian kinerja belanja daerah dapat dilihat bahwa rata rata realisasi belanja DKUM sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar 87.59 % dengan anggaran belanja turun sebesar Rp 3,482,191,732.00 dan rata – rata realisasi belanja menurun sebesar Rp 2,553,592,955.00. Penurunan ini terdapat pada Belanja Langsung karena adanya refocusing anggaran dan terjadinya pandemik Covid-19. Adapun kenaikan rata-rata pertumbuhan anggaran Belanja Langsung disebabkan pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan selama kurun waktu Tahun 2016–2020 dapat digambarkan sesuai tabel TC. 24





**2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang koperasi dan usaha mikro di Kota Depok.

Kunci keberhasilan suatu organisasi selain oleh ketepatan penyusunan strategi organisasi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.

Berbagai situasi, kondisi dan tantangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro akhir-akhir ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Undang-undang Cipta Kerja Tahun 2021 yang salah satu pasalnya tentang kemudahan pendirian koperasi. Hal tersebut berpengaruh positif pada pelayanan DKUM khususnya pada bidang kelembagaan dalam hal pendirian, pengembangan perkoperasian, dan pembubaran koperasi. Termasuk juga berpengaruh pada pelayanan pengawasan koperasi.
2. Lahirnya revolusi industri 4.0 yang mengharuskan segala aktifitas berbasis teknologi informasi dimana sebagian besar koperasi belum familiar menggunakan teknologi informasi sehingga berdampak pada daya saing koperasi dan usaha mikro itu sendiri.
3. Kondisi kependudukan Kota Depok berupa bonus demografi yang sebagian besar berada pada usia produktif. Namun relatif masih sangat sedikit yang berminat dan bergabung dalam koperasi serta menjadi wirausaha.
4. Citra dan tingkat kepercayaan terhadap koperasi masih rendah.
5. Menurunnya daya beli masyarakat sehingga berpengaruh terhadap pendapatan pelaku koperasi dan usaha mikro. Hal ini diperparah dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang sangat membatasi aktivitas warga sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi warga, termasuk di bidang koperasi dan usaha mikro.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro meliputi:

1. Adanya regulasi yang mendukung pengembangan koperasi dan usaha mikro.
2. Adanya globalisasi dan berkembangnya digitalisasi sehingga terbuka sangat luas pasar produk koperasi dan usaha mikro.
3. Era kolaborasi dan sinergi untuk bekerjasama dengan berbagai stakeholder.
4. Kemudahan dalam akses pembiayaan atau permodalan untuk pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dari perbankan dan non perbankan.
5. Adanya jumlah penduduk yang besar di Kota Depok (bonus demografi) menjadi peluang pasar untuk pelaku koperasi dan usaha mikro.

**BAB III**

**ISU – ISU STRATEGIS**

Analisis isu-isu strategis yang berkembang di daerah merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam RPJMD Kota Depok 2021-2026, telah ditetapkan beberapa isu strategis yang menjadi permasalahan pembangunan Kota Depok yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok lima tahun mendatang. Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026 terlebih dahulu perlu digali permasalahan-permasalahan yang terjadi, selanjutnya dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, antara lain dirumuskan dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini dan perkiraan kondisi dimasa yang akan datang. Penentuan isu strategis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

Dalam upaya meningkatkan pengembangan pelayanan, maka DKUM Kota Depok harus mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya berdasarkan tugas dan fungsinya sebagaimana dirumuskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
| --- | --- | --- |
|
| 1. Belum berkualitasnya koperasi di Kota Depok
 | Kurang professional dan kompeten pengurus/ pengelola koperasi | Masih banyak pengurus/ pengelola yang tidak memiliki sertifikasi kompetensi |
|  |  | Kurangnya penyuluhan, Pendidikan dan pelatihan bagi pengurus koperasi |
|  |  | Rendahnya tingkat pendidikan anggota/ pengurus koperasi |
|  | Rendahnya partisipasi anggota | Kurangnya penyuluhan, Pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi |
|  | Koperasi kurang diminati oleh masyarakat | Citra dan tingkat kepercayaan terhadap koperasi masih rendah |
|  | Minimnya penggunaan teknologi informasi | Pengelolaan koperasi masih dilakukan secara konvensional |
|  | Rendahnya pemahaman generasi muda terhadap koperasi | Kurangnya pengetahuan informasi terhadap keberadaan manfaat koperasi |
|  | Kurangnya permodalan koperasi | Koperasi tidak memiliki perencanaan yang baik  |
|  | Banyaknya koperasi yang tidak aktif | Persaingan usaha dengan koperasi lain, antar koperasi dan badan usaha lainnya |
|  | Koperasi tidak dijalankan dengan efektif dan efisien | Kurangnya pemahaman manajerial |
|  | Banyak koperasi tidak dijalankan sesuai dengan aturan | Kurangnya pengawasan koperasi |
| 2. Rendahnya persentase wirausaha  | Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha mikro | Kurangnya kemampuan dasar berwirausaha |
|  | Rendahnya tata kelola usaha mikro | Kurangnya kemampuan manajerial pelaku usaha |
|  | Rendahnya daya saing produk usaha mikro | Kurangnya kualitas dan inovasi produk |
|  | Rendahnya permodalan pelaku usaha mikro | Masih kesulitan mendapatkan perizinan berusaha |
|  |  | Kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam membuat proposal permodalan |
|  | Rendahnya pemasaran produk | Kurangnya sarana dan prasarana pemasaran |

**3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah**

 **Visi**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi Pemerintah Kota Depok tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok adalah : “***DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”***.

Pernyataan visiini menunjukkan Kota Depok yang maju dalam pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur sehinga dapat memicu produktivitas, daya saing dan kualitas hidup masyarakat.

 **Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang modern dan partisipatif.
3. Mewujudkan masyarakat yang religius dan berbudaya berbasis kebhinekaan dan ketahanan keluarga.
4. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing.
5. Mewujudkan kota yang sehat, aman, tertib dan nyaman.

Tujuan misi pertama “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Teknologi Dan Berwawasan Lingkungan” adalah:

1. Terwujudnya Infrastruktur Fisik Dan Digital Yang Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan. Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :
2. Terwujudnya Infrastruktur Perkotaan Yang Merata, Berkualitas, Ramah Dan Nyaman.
3. Tersedianya Infrastruktur Digital Yang Berkualitas, Aksesibel, Dan Terintegrasi.
4. Meningkatnya Kualitas Permukiman.
5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Tujuan misi kedua “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Modern Dan Partisipatif” adalah:

1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi Efektif Dan Efisien. Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :
2. Meningkatnya Kapasitas Dan Kinerja Birokrasi.

Tujuan misi ketiga “Mewujudkan Masyarakat Yang Religius Dan Berbudaya Berbasis Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga” adalah:

1. Membangun Masyarakat Kota Depok Yang Berbudaya Berlandaskan Nilai-Nilai Keagamaan, Kebhinekaan Dan Ketahanan Keluarga. Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :
2. Terwujudnya Ekosistem Kebudayaan Yang Kondusif Bagi Pencapaian Kebahagian Warga.
3. Terwujudnya Ekosistem Pendidikan Yang Baik Dalam Mewujudkan Dan Mendorong Pembangunan Yang Berkelanjutan.
4. Meningkatnya Ketahanan Sosial Masyarakat Depok Berdasarkan Nilai Keagamaan Dan Kebhinekaan.
5. Terbangunnya Ketahanan Keluarga.

Tujuan misi keempat “Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berdaya Saing” adalah:

1. Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi Kota Yang Maju, Berdaya Saing Dan Mandiri. Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi.
3. Menurunkan Angka Kemiskinan.
4. Meningkatkan Kesempatan Kerja.

Tujuan misi kelima “Mewujudkan Kota Yang Sehat, Aman, Tertib Dan Nyaman” adalah:

1. Membangun Kualitas Kehidupan Masyarakat Kota Depok Yang Sehat, Nyaman, Aman, dan Tertib. Dalam tujuan ini terdapat sasaran antara lain :
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Meningkatnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Serta Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.

Dari seluruh misi di atas, misi ke-4 “Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing” merupakan misi yang terkait langsung dengan urusan Koperasi dan Usaha Mikro.

Disamping itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mendapatkan tugas untuk merealisasikan Janji Walikota Depok periode 2021-2026, yaitu menciptakan 5000 Pengusaha / Start Up Baru Dan 1000 Perempuan Pengusaha. Program 5000 Pengusaha / Start Up Baru dan 1000 perempuan pengusaha adalah suatu program dalam menciptakan, mengembangkan dan mendampingi pelaku usaha mikro hingga kegiatan usahanya dapat meningkat dan berkembang. Berkembangnya para pelaku usaha mikro dapat berarti membantu terwujudnya pengusaha atau UMKM yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Selain itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pendampingan bagi badan usaha koperasi yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang bergerak di koperasi.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan DKUM Kota Depok

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok mempunyai tugas menjalankan misi ke-4 yaitu “mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing”. Adapun Sasaran dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok adalah koperasi dan pelaku usaha mikro. Dalam pencapaian misi dan sasaran tersebut, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat, yaitu:

1. Faktor pendorong
2. Regulasi untuk koperasi dan usaha mikro
3. Bonus demografi
4. Infrastruktur teknologi informasi
5. Faktor penghambat
6. Citra dan kepercayaan koperasi rendah
7. Kapasitas SDM koperasi dan usaha mikro
8. Permodalan pelaku koperasi dan usaha mikro
9. Pemasaran produk koperasi dan usaha mikro

**3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota atau Provinsi Jawa Barat**

Telaahan atas Renstra K/L dan Renstra Provinsi dalam hal ini adalah Renstra Kementrian Koperasi dan UKM, Renstra DKUM Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra DKUM Kota Depok terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai acuan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Depok, dipandang perlu memperhatikan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tabel 3.3

Telaahan terhadap Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023** | **Permasalahan Pelayanan DKUM**  | **Faktor** |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1.2. | **Persentase Koperasi yang mengakses kredit****Umkm Naik Kelas** | Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang pembiayaan perkreditanRendahnya pengembangan daya saing produk usaha mikro | Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang pembiayaan perkreditanKurangnya kualitas dan inovasi produk  | Mengembangkan hubungan kemitraan dengan lembaga keuuanganMengembangkan hubungan interaktif antara pemerintah dan pelaku usaha mikro |

Telaahan terhadap Renstra Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Tahun 2020-2024** | **Permasalahan Pelayanan DKUM**  | **Faktor** |
| **Penghambat** | **Pendorong** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1.2.3.4.5. | Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat,Mandiri dan MajuMewujudkan UMKM Naik Kelas yangBerdaulat dan Mampu Bersaing di PasarDomestik dan GlobalUmkm Naik KelasMenyediakan Kebijakan PengembanganKoperasi dan UMKM yang EfektifMenyelenggarakan Kebijakan PengembanganKoperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaatdan BerkelanjutanMenyelenggarakan Pengendalian PengawasanKebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM | Keerbatasan jangkauan pelayanan, fasilitasi, dan pembinaan pelaku koperasi dan usaha mikro | 1. Keterbatasan anggaran
2. Belum diketahuinya data seluruh potensi pelaku koperasi dan usaha mikro
3. Kurangnya sinergitas antar PD dan dengan stakeholder lain
 | 1. Adanya komitmen pengembangan koperasi dan usaha mikro
2. Adanya kesesuaian program dengan kementrian
 |

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis**

Adapun peran bagi berkenaan dengan pengaturan ruang bagi kepentingan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang harus selaras dengan pengembangan di masa mendatang.



**Gambar 3.1.** Posisi Kota Depok Diantara Wilayah Jabodetabek

Melihat gambar tersebut diatas, secara geografis dapat dipahami bahwa posisi kota Depok tepat berada di tengah-tengah interaksi wilayah Jabodetabek. Hal ini menimbulkan potensi yang baik dari sisi pembangunan wilayah dan ekonomi, tetapi di sisi lain juga menghadapi tantangan yang tidak mudah terkait dengan persoalan sistem transportasi, urbanisasi, migrasi, alih fungsi lahan, masalah sosial dan lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 – 2032 pada pasal 45 huruf d ditetapkan meliputi :

1. Industri kecil/mikro;
2. Industri menengah; dan
3. Industri besar.

Industri kecil/mikro sebagaimana dimaksud pada ayat a diatas meliputi:

a. Industri makanan di Kelurahan Sawangan, Kelurahan Krukut, Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Mampang, Kelurahan Depok, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Sukamaju, dan Kelurahan Tapos;

b. Industri minuman di Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Tugu, Kelurahan Depok Jaya, dan Kelurahan Harjamukti;

c. Industri konveksi di Kelurahan Cipayung;

d. Industri reparasi motor di Kelurahan Ratu Jaya, Kelurahan Sukmajaya, dan Kelurahan Depok;

e. Industri reparasi mobil di Kelurahan Tirtajaya, Kelurahan Pondok Cina, Kelurahan dan Depok Jaya;

f. Industri reparasi alat angkutan bukan kendaraan bermotor di Kelurahan Pangkalan Jati;

g. Industri percetakan di Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Pondok CIna, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Depok, Kelurahan Tugu, dan Kelurahan Tirtajaya;

h. Industri furniture di Kelurahan Beji dan Kelurahan Cilangkap;

i. Industri alat pemainan dan mainan anak-anak di Kelurahan Sukamaju;

j. Industri barang logam lainnya di Kelurahan Mekarsari, Kelurahan Tugu, Kelurahan Kukusan, Kelurahan Sukamaju dan Kelurahan Cilangkap;

k. Industri madu di Kelurahan Harjamukti dan Kelurahan Jatijajar;

l. Industri peralatan listrik di Kelurahan Kedaung, Kelurahan Abadijaya, dan Kelurahan Tugu;

m. Industri sabun dan detergen di Kelurahan Limo, Kelurahan Mampang, dan Kelurahan Cisalak;

n. Industri Pengolahan lainnya di Kelurahan Limo;

o. Industri obat tradisional di Kelurahan Kedaung;

p. Industri barang dari semen, kapur, gips, dan asbes di Kelurahan Sawangan Baru; dan

q. Industri farmasi dan produk obat kimia di Kelurahan Rangkapan Jaya dan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru.

Dengan penetapan peruntukan industri diatas tersebut memungkinkan tersedianya peluang pendirian koperasi karyawan dan koperasi produsen disesuaikan dengan potensi masing-masing. Untuk penetapan peruntukan diluar industri seperti jasa dan perdagangan serta permukiman memungkinkan berdirinya koperasi simpan pinjam atau koperasi konsumen. Pelaku usaha mikro bisa menjadi pemasok bagi industri yang ada.

Pasal 46

(1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:

1. perumahan dengan kepadatan tinggi dikembangkan dengan luas kurang lebih 591,40 (lima ratus sembilan puluh satu koma empat nol) hektar atau 2,95 (dua koma sembilan lima) persen meliputi:

1. Kelurahan Beji;

2. Kelurahan Beji Timur;

3. Kelurahan Depok;

4. Kelurahan Depok Jaya;

5. Kelurahan Kemiri Muka;

6. Kelurahan Kukusan;

7. Kelurahan Pancoran Mas;

8. Kelurahan Ratu Jaya;

Dengan penetapan peruntukan perumahan diatas tersebut memungkinkan tersedianya peluang pendirian koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumen. Dan bagi pelaku usaha mikro bisa menjadi suatu peluang untuk membuka usaha berkaitan dengan pelayanan bagi di kawasan masyarakat tersebur diatas. Misalnya untuk usaha kuliner dan craft/ kerajinan.

Pasal 47

(1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b meliputi:

a. pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan;

b. toko modern; dan

c. pusat perbelanjaan dan niaga.

(2) Rencana pengembangan pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. pengembangan diarahkan ke seluruh SPK;

b. pengembangan diarahkan pada jalan kolektor primer,

kolektor sekunder dan jalan lingkungan meliputi:

1. SPK Cipayung pada ruas Jalan Cipayung, Jalan Keadilan dan Jalan Citayam;
2. SPK Tapos pada ruas Jalan Cibinong – Cimpaeun, Jalan Raya Tapos, Jalan Leuwinanggung, Jalan Belong, Jalan Kopasus Sukatani, Jalan Kebayunan dan Jalan RadenSaleh; dan
3. SPK Cimanggis pada ruas Jalan Tole Iskandar, Jalan Kebahagiaan, Jalan Kejayaan, Jalan Kemakmuran, Jalan Proklamasi, Jalan Sinar Matahari, Jalan Gas Alam, Jalan Akses UI, Jalan Raya Ciherang, Jalan RTM Kelapa Dua, Jalan Cisalak Pasar, Jalan Mekarsari, Jalan Radar Auri, Jalan Raya Bogor, Jalan Putri Tunggal, Jalan Alternatif Cibubur (Trans Yogi), Jalan Raya Sukatani,Jalan Pondok Duta, Jalan Keadilan Raya, Jalan Nusantara dan Jalan Prof. Lefran Pane.
4. SPK Cinere pada ruas Limo Raya, Pangkalan Jati, Jalan Raya Gandul, dan Jalan Bukit Cinere;
5. SPK Sawangan pada ruas Jalan Raya Pengasinan, Jalan Raya Pasir Putih, Jalan Cinangka Raya, Jalan Raya Parung-Ciputat, Jalan Raya Muhtar, Jalan Raya Curug,dan Jalan Raya Serua.
6. Penataan dilakukan di pusat kota dan wilayah Utara yaitu di PPK Margonda dan SPK Cinere;
7. penataan dilakukanpada jalan kolektor primer, kolektor sekunder dan jalan lingkungan meliputi:
8. PPK Margonda pada ruas jalan Margonda; dan
9. SPK Cinere pada ruas Jalan Cinere Raya, Jalan Merawan, dan Jalan Raya Sawangan;
10. merevitalisasi pasar lingkungan di Pasar Cisalak, Kecamatan Cimanggis;
11. mempertahankan keberadaan pasar lingkungan yang telah ada;
12. mengembangkan pasar lingkungan di SPK Sawangan, SPK Tapos, dan SPK Cipayung;
13. memperhatikan daya dukung lalu lintas dan ketentuan teknis parkir; dan
14. harus dilengkapi terminal kecil/pangkalan untuk pemberhentian kendaraan, pos keamanan, sistem pemadam kebakaran dan musholla/tempat ibadah.

Dengan penetapan peruntukan perdagangan dan jasa diatas tersebut memungkinkan tersedianya peluang pendirian koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen dan koperasi jasa. Dan bagi pelaku usaha mikro bisa menjadi suatu peluang untuk membuka usaha berkaitan dengan pelayanan bagi di kawasan masyarakat tersebut diatas.

Adapun hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengolahan limbah dari hasil kegiatan industri kecil menengah dan usaha mikro supaya dilaksanakan secara mandiri dan terpadu dengan teknologi tepat guna.
2. Kegiatan industri kecil menengah dan usaha mikro akan berdampak tidak langsung pada kebutuhan air sehingga perlu pengelolaan sumber mata air dan perbaikan penyaluran air bersih.

**3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Perumusan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan DKUM Kota Depok senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DKUM Kota Depok adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi DKUM Kota Depok dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi DKUM Kota Depok diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DKUM Kota Depok di masa lima tahun mendatang.

 Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada DKUM Kota Depok yang menjadi permasalahan utama adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan laporan kinerja dinas
2. Belum berkualitasnya koperasi
3. Rendahnya persentase wirausaha

Kebijakan bidang urusan koperasi dan usaha mikro diarahkan dalam rangka mendukung perwujudan misi keempat Pemerintah Kota Depok yaitu “Mewujudkan masyarkat yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing” dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
2. Menurunkan Angka Kemiskinan
3. Meningkatnya kesempatan kerja.

Dari ketiga sasaran strategis tersebut maka dibutuhkan strategi Meningkatkan daya saing koperasi dan Usaha Mikro dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan manajemen koperasi .
2. Penciptaan wirausaha baru dan usaha mikro naik omset.

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok adalah Metode Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT). Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut, yang akan menghasilkan analisis dan pilihan strategis. Asumsi-asumsi hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menentukan Faktor Penentu Keberhasilan dan Faktor Ancaman Kegagalan. Faktor Kekuatan (*Strengths)*, Kelemahan (*Weaknesses)*, Peluang (*Opportunities)*, dan Ancaman (*Threats)*

Tabel 3.4

Faktor Internal dan Eksternal

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Koa Depok

|  |  |
| --- | --- |
| **INTERNAL** | **EKSTERNAL** |
| **Kekuatan (*Strengths*)** | **Peluang (*Opportunities*)** |
| 1. Memiliki Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang Memadai
2. Memiliki Balai Pelatihan Koperasi Kota
3. Komitmen Pemerintah Kota terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Tinggi
 | 1. Adanya Regulasi yang Mendukung Koperasi dan Usaha Mikro2. Adanya sistem globalisasi dan digitalisasi pasar produk koperasi dan usaha mikro terbuka luas.3. Sinergi kerjasama dari berbagai stakeholder.4. Tersedianya fasilitasi akses pembiayaan untuk pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dari perbankan dan non perbankan.5. Adanya jumlah penduduk yang besar di Kota Depok (bonus demografi) menjadi peluang pasar untuk pelaku koperasi dan usaha mikro. |
|

|  |
| --- |
| **Kelemahan (*Weaknesses*)**  |

 | **Ancaman (*Threats*)** |
| 1. Pemberdayaan SDM Aparatur Koperasi dan Usaha Mikro Belum Optimal
2. Belum ada Roadmap Koperasi dan Usaha Mikro Potensial
3. Pemanfaatan teknologi informasi di Koperasi dan Usaha Kecil belum optimal
4. Sinergitas dengan Instansi lain dan daerah kurang optimal
 | 1. Kemudahan pendirian koperasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang mendirikan koperasi untuk kepentingan pribadi.
2. Lahirnya revolusi industri 4.0 yang mengharuskan segala aktifitas berbasis teknologi informasi dimana sebagian besar koperasi belum familiar menggunakan teknologi informasi sehingga berdampak pada daya saing koperasi itu sendiri.
3. Kondisi kependudukan Kota Depok bonus demografi yang sebagian besar berada pada usia produktif. Namun sangat sedikit yang berminat untuk bergabung dalam koperasi serta menjadi wirausaha.
4. Citra dan tingkat kepercayaan terhadap koperasi masih rendah
5. Menurunnya daya beli masyarakat sehingga berpengaruh terhadap pendapatan pelaku koperasi dan usaha mikro.
 |

**BAB IV**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

* 1. **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD**

Tujuan suatu organisasi atau institusi disusun dalam rangka pengendalian dan evaluasi misi yang telah ditetapkan. Sementara sasaran merupakan tolak ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Tujuan tersebut. Tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tercermin langsung dari Misi Keempat dan Kedua RPJMD Kota Depok 2021-2026.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan yang akan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yaitu antara Tahun 2021-2026. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara itu, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian / target masing masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro secara sistematis dijabarkan dalam table berikut.

Tabel 4.2

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 2021-2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TUJUAN/ SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN**  | **Definisi Operasional** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | Tujuan : Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan | Nilai SAKIP | Penilaian Inspektorat Daerah/ Menpan RB | 70.15 | 70.20 | 70.30 | 70.40 | 70.50 |
| 1.1. | Sasaran : Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel | Nilai SAKIP | Penilaian Inspektorat Daerah/ Menpan RB | 70.15 | 70.20 | 70.30 | 70.40 | 70.50 |
| 2. | Tujuan : Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing | Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dan UMKM | persentase rata-rata pertumbuhan volume usaha koperasi dan usaha mikro | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 2.1 | Sasaran : Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro | Koperasi Berkualitas | Jumlah koperasi berkualitas dibagi total jumlah koperasi | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
| Persentase wirausaha | Jumlah usia penduduk produktif Kota Depok yang berwirausaha dibagi dengan total jumlah usia produktif Kota Depok | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |

**BAB V**

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan dirancang strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi yang akan dilaksanakan tersebut harus berpedoman pada kepada strategi dalam RPJMD Kota Depok.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel T-C.26**

**TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

|  |
| --- |
| VISI : DEPOK YANG MAJU, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA |
| MISI II : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG MODERN DAN PARTISIPATIF |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transparan | Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel | Melaksanakan reformasi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik  | Melaksanakan reformasi birokrasi melalui Pemanfaatan teknologi informasi dan megembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang partisipatif  |
| MISI IV : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang berdaya saing | Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro | 1. Meningkatkan tata kelola koperasi
2. Meningkatkan minat dan kapasitas wirausaha masyarakat
 | 1. Peningkatan manajemen koperasi
2. Penciptaan wirausaha baru dan usaha mikro naik omset
 |

**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi dinas yang ditetapkan Dinas Koperasi dan usaha Mikro maka perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (output)dari kegiatan yang dilaksanakan. Rencana program dan kegiatan dapat disajikan melalui tabel berikut:

Tabel Program Kegiatan disertai Pendanaan Pagu Indikatif

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN** |  **INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN**  |  **DEFINISI OPERASIONAL (RUMUS)**  |  **Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)** |  **CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KERANGKA PENDANAAN**  |
| **TAHUN 2022** | **TAHUN 2023** | **TAHUN 2024** | **TAHUN 2025** | **TAHUN 2026** | **KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD** |
| **TARGET** | **Rp.** | **TARGET** | **Rp.** | **TARGET** | **Rp.** | **TARGET** | **Rp.** | **TARGET** | **Rp.** | **TARGET** | **Rp.** |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |   | 0 |   |   |  **24.285.144.731**  |   |  **27.452.448.094**  |   |  **31.501.392.903**  |   |  **36.340.922.193**  |   |  **42.518.851.413**  |   |  **162.098.759.334**  |
| **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Cakupan pelayanan penunjang urusan Pemda** |  | **100%** | **100%** |  **9.294.144.731**  | **100%** |  **10.209.948.094**  | **100%** |  **11.217.942.903**  | **100%** |  **12.320.237.193**  | **100%** |  **13.545.260.913**  | **100%** |  **56.587.533.834**  |
| **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi tepat waktu** | **jumlah dokumen selesa tepat waktu/jumlah dokumen** | **100%** | **100%** |  **130.000.000**  | **100%** |  **120.000.000**  | **100%** |  **125.000.000**  | **100%** |  **130.000.000**  | **100%** |  **160.000.000**  | **100%** |  **665.000.000**  |
|  Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  Jumlah Dokumen  |   | 2 |  2  |  90.000.000  |  2  |  75.000.000  |  2  |  75.000.000  |  2  |  75.000.000  |  3  |  100.000.000  |  12  |  415.000.000  |
|  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |  Jumlah Dokumen  |   | 19 |  19  |  40.000.000  |  19  |  45.000.000  |  19  |  50.000.000  |  19  |  55.000.000  |  19  |  60.000.000  |  19  |  250.000.000  |
| **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **persentase adm keuangann tepat waktu** | **jumlah dokumen selesai tepat waktu/jumlah dokumen ( Terdiri dari 5 Dokumen : LRA, Neraca, LO, Laporan Perubahan Equitas, CALK )** | **100%** | **100%** |  **7.663.589.176,10**  | **100%** |  **8.429.948.093,71**  | **100%** |  **9.272.942.903,08**  | **100%** |  **10.200.237.193,39**  | **100%** |  **11.220.260.912,73**  | **100%** |  **46.786.978.279,01**  |
|  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Pegawai |   | 34 |  34  |  7.663.589.176,10  |  34  |  8.429.948.093,71  |  34  |  9.272.942.903,08  |  34  |  10.200.237.193,39  |  34  |  11.220.260.912,73  |  34  |  46.786.978.279,01  |
| **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **persentse penyediaan adm umum perkantoran** | **Rata - rata indikator kegiatan**  | **100%** | **100%** |  **940.555.555**  | **100%** |  **1.005.000.000**  | **100%** |  **1.070.000.000**  | **100%** |  **1.135.000.000**  | **100%** |  **1.200.000.000**  | **100%** |  **5.350.555.555**  |
|  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jenis Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |   |  18  |  25.000.000  |  18  | 30000000 |  18  |  35.000.000  |  18  |  40.000.000  |  18  |  45.000.000  |  18  |  175.000.000  |
|  Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jenis Alat Tulis Kantor |   | 50 |  43  |  145.000.000  |  43  |  155.000.000  |  43  |  165.000.000  |  43  |  175.000.000  |  43  |  185.000.000  |  43  |  825.000.000  |
|   | Jumlah inventaris kantor |   | 0 |  8  |  8  |  8  |  8  |  8  |  8  |   |
|  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jenis Peralatan Rumah Tangga |   | 25 |  25  |  45.000.000  |  25  | 50000000 |  25  |  55.000.000  |  25  |  60.000.000  |  25  |  65.000.000  |  25  |  275.000.000  |
|  Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jenis Makanan dan Minuman |   | 3 |  3  |  215.000.000  |  3  | 230000000 |  3  |  245.000.000  |  3  |  260.000.000  |  3  |  275.000.000  |  3  |  1.225.000.000  |
|  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan |   | 28 |  22  |  135.555.555  |  22  | 150000000 |  22  |  165.000.000  |  22  |  180.000.000  |  22  |  195.000.000  |  22  |  825.555.555  |
|  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Aparatur yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultansi Dalam dan Luar Daerah |   | 272 |  253  |  375.000.000  |  253  | 390000000 |  253  |  405.000.000  |  253  |  420.000.000  |  253  |  435.000.000  |  253  |  2.025.000.000  |
| **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah** | **Rata - rata indikator kegiatan**  | **100%** | **100%** |  **370.000.000**  | **100%** |  **415.000.000**  | **100%** |  **460.000.000**  | **100%** |  **505.000.000**  | **100%** |  **550.000.000**  | **100%** |  **2.300.000.000**  |
|  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |  Jumlah rekening jasa  |   | 3 |  3  |  120.000.000  |  3  |  140.000.000  |  3  |  160.000.000  |  3  |  180.000.000  |  3  |  200.000.000  |  3  |  800.000.000  |
|  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  Jumlah pegawai  |   | 6 |  6  |  250.000.000  |  6  |  275.000.000  |  6  |  300.000.000  |  6  |  325.000.000  |  6  |  350.000.000  |  6  |  1.500.000.000  |
| **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **persentase barang milik daerah terpelihara** | **jumlah barang milik daerah kondisi baik dibagi jumlah barang** | **100%** | **100%** |  **190.000.000**  | **100%** |  **240.000.000**  | **100%** |  **290.000.000**  | **100%** |  **350.000.000**  | **100%** |  **415.000.000**  | **100%** |  **1.485.000.000**  |
|  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |  Jumlah kendaraan  |   | 12 |  10  |  80.000.000  |  10  |  100.000.000  |  10  |  120.000.000  |  10  |  140.000.000  |  10  |  160.000.000  |  10  |  600.000.000  |
|  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor  |   | 6 |  6  |  50.000.000  |  6  |  65.000.000  |  6  |  80.000.000  |  6  |  100.000.000  |  6  |  125.000.000  |  6  |  420.000.000  |
|  Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  Jumlah gedung  |   | 1 |  1  |  60.000.000  |  1  |  75.000.000  |  1  |  90.000.000  |  1  |  110.000.000  |  1  |  130.000.000  |  1  |  465.000.000  |
| **Peningkatan Pelayanan BLUD** | **Cakupan Pelayanan BLUD**  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM** | **Presentase Penerbitan Izin Usaha simpan pinjam** | **Jumlah koperasi izin usaha simpan pinjam dibagi jumlah koperasi usaha simpan pinjamdata dasar perhitungan = 132** | **30,30%** | **63,64%** |  **50.000.000**  | **73,48%** |  **50.000.000**  | **83,33%** |  **50.000.000**  | **93,94%** |  50.000.000  | **100%** |  50.000.000  | **100%** |  250.000.000  |
| **Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Pelayanan IUSP (Ijin Usaha Simpan Pinjam)** | **Persentase koperasi yang diterbitkan IUSP dibagi jumlah koperasi IUSP yang mengajukan** | **100%** | **100%** |  **50.000.000**  | **100%** |  **50.000.000**  | **100%** |  **50.000.000**  | **100%** |  50.000.000  | **100%** |  50.000.000  | **100%** |  250.000.000  |
| Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pelayanan IUSP (Ijin Usaha Simpan Pinjam) | Persentase koperasi yang diterbitkan IUSP dibagi jumlah koperasi IUSP yang mengajukan | 100% | **100%** |  50.000.000  | **100%** |  50.000.000  | **100%** |  50.000.000  | **100%** |  50.000.000  | **100%** |  50.000.000  | **100%** |  250.000.000  |
| **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Presentase Tingkat Kepatuhan Koperasi** | **Jumlah koperasi yang memenuhi syarat kepatuhan dibagi dengan jumlah seluruh koperasidata dasar perhitungan : 165 koperasi tiap tahun** | **29,09%** | **47,27%** |  **460.000.000**  | **56,36%** |  **530.000.000**  | **65,45%** |  **600.000.000**  | **74,55%** |  **670.000.000**  | **83,64%** |  **740.000.000**  | **84%** |  **3.000.000.000**  |
| **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota** | **Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksa** | **Jumlah Koperasi yang diawasi dan diperiksadata dasar perhitungan : 165 koperasi tiap tahun** | **100%** | **100%** |  **460.000.000**  | **100%** |  **530.000.000**  | **100%** |  **600.000.000**  | **100%** |  **670.000.000**  | **100%** |  **740.000.000**  | **100%** |  3.000.000.000  |
| Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang di awasi | Jumlah Koperasi yang di awasi | 165 | 165 |  385.000.000  | 165 |  420.000.000  | 165 |  455.000.000  | 165 |  490.000.000  | 165 |  525.000.000  | 165 |  2.275.000.000  |
| Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang diperiksa | Jumlah koperasi yang diperiksa | 165 | 165 |  75.000.000  | 165 |  110.000.000  | 165 |  145.000.000  | 165 |  180.000.000  | 165 |  215.000.000  | 165 |  725.000.000  |
| **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Presentase Tingkat Kesehatan Koperasi USP** | **Jumlah koperasi yang sehat dibagi dengan jumlah seluruh koperasi USPdata dasar perhitungan : 132 koperasi tiap tahun** | **13,64%** | **21,2%** |  **200.000.000**  | **25,0%** |  **225.000.000**  | **28,79%** |  **250.000.000**  | **32,58%** |  **275.000.000**  | **36,36%** |  **300.000.000**  | **36,36%** |  **1.250.000.000**  |
| **Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase koperasi yang dinilai tingkat kesehatan USP** | **Jumlah koperasi yang dinilai tingkat kesehatan USP dibagi jumlah koperasi usaha simpan pinjam** | **100%** | **100%** |  **200.000.000**  | **100%** |  **225.000.000**  | **100%** |  **250.000.000**  | **100%** |  **275.000.000**  | **100%** |  **300.000.000**  | **100%** |  **1.250.000.000**  |
| Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang dinilai tingkat kesehatan USP | Jumlah koperasi yang dinilai tingkat kesehatan USP | 100 | 110 |  175.000.000  | 115 |  200.000.000  | 120 |  225.000.000  | 125 |  250.000.000  | 130 |  275.000.000  | 130 |  1.125.000.000  |
| Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koperasi yang diberi penghargaan | Jumlah koperasi yang diberi penghargaan | N.A | 5 |  25.000.000  | 5 |  25.000.000  | 5 |  25.000.000  | 5 |  25.000.000  | 5 |  25.000.000  | 25 |  125.000.000  |
| **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Presentase koperasi yang dilatih** | **jumlah koperasi yang dibina di bagi jumlah koperasi data dasar perhitungan : 165 koperasi tiap tahun** | **30,30%** | **60,61%** |  **660.000.000**  | **75,76%** |  **685.000.000**  | **100%** |  **710.000.000**  | **100%** |  **735.000.000**  | **100%** |  **760.000.000**  | **100%** |  **3.550.000.000**  |
| **Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kompetensi** | **Persentase pengurus koperasi yang mempunyai kompetensi (manajer USP/KSP, manajer retail, Bendahara, juru buku)data dasar : 165 x 4 = 660**  | **7,58%** | **32,12%** |  **660.000.000**  | 49,09% |  **685.000.000**  | 66,06% |  **710.000.000**  | 83,03% |  **735.000.000**  | **100,00%** |  **760.000.000**  | **100,00%** |  **3.550.000.000**  |
| Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah anak sekolah paham koperasi | Jumlah anak sekolah paham koperasi | N.A | 550 |  660.000.000  | 550 |  685.000.000  | 550 |  710.000.000  | 550 |  735.000.000  | 550 |  760.000.000  | 2750 |  3.550.000.000  |
| Jumlah anggota koperasi | Jumlah anggota koperasi yang mendapatkan penyuluhan | N.A | 1100 |   | 1100 |   | 1100 |   | 1100 |   | 1100 |   | 5500 |   |
| Jumlah pengurus koperasi yang terlatih | Jumlah pengurus koperasi yang terlatih | 75 | 125 |   | 125 |   | 125 |   | 125 |   | 125 |   | 625 |   |
| Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang tersertifikasi | Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang tersertifikasi | N.A | 100 |   | 100 |   | 100 |   | 100 |   | 100 |   | 500 |   |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **Persentase koperasi modern** | **jumlah koperasi modern dibagi jumlah koperasi (Koperasi modern DO di P-Renstra kemenkop)data dasar perhitungan = 165 koperasi**  | **N.A** | **3,03%** |  **1.710.000.000**  | 6,06% |  **2.028.000.000**  | 9,09% |  **2.636.400.000**  | 12,12% |  **3.427.320.000**  | 15,15% |  **4.455.516.000**  | 15,15% |  **14.107.236.000**  |
| **Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase Jumlah Koperasi yang diberdayakan** | **Jumlah Koperasi yang diberdayakan dibagi jumlah koperasi data dasar : 165** | **100%** | **100%** |  **1.710.000.000**  | **100%** |  **2.028.000.000**  | **100%** |  **2.636.400.000**  | **100%** |  3.427.320.000  | **100%** |  4.455.516.000  | 100% |  14.257.236.000 |
| Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah pemeringkatan koperasi  | Jumlah pemeringkatan koperasi | N.A | 165 |  1.710.000.000  | 165 |  2.028.000.000  | 165 |  2.636.400.000  | 165 |  3.427.320.000  | 165 |  4.455.516.000  | 165 |  14.107.236.000  |
| Jumlah koperasi peningkatan manajemen | Jumlah koperasi peningkatan manajemen | N.A | 50 |   | 50 |   | 50 |   | 50 |   | 65 |   |   |   |
| Jumlah koperasi yang terakses digitalisas | Jumlah koperasi yang terakses digitalisas | N.A | 50 |   | 50 |   | 50 |   | 50 |   | 65 |   |   |   |
| Jumlah koperasi yang terestruktur usahanya | Jumlah koperasi yang terestruktur usahanya | 50 | 50 |   | 50 |   | 50 |   | 50 |   | 50 |   |   |   |
| Jumlah koperasi yang terfasilitasi akses permodalan | Jumlah koperasi yang terfasilitasi akses permodalan | 25 | 100 |   | 100 |   | 100 |   | 100 |   | 100 |   |   |   |
| Jumlah koperasi yang tergabung dalam jaringan usaha koperasi | Jumlah koperasi yang tergabung dalam jaringan usaha koperasi | 25 | 40 |   | 40 |   | 40 |   | 40 |   | 40 |   |   |   |
| **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Persentase wirausaha baru** | **Jumlah wirausaha baru dibagi denganTarget wirausaha baru sampai dengan akhir periode (8.570 usaha mikro)** | **19,71%** | **50,53%** |  **5.545.000.000**  | **77%** |  **7.208.500.000**  | **100%** |  **9.371.050.000**  | **100%** |  **12.182.365.000**  | **100%** |  **15.837.074.500**  | **100%** |  **50.143.989.500**  |
| **Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** | **Persentase jumlah wirausaha baru dan pengusaha perempuan** | **Persentase Jumlah pengusaha baru/ startup dan perempuan pengusaha yang terbentuk dibagi jumlah target pengusaha baru/starup dan perempuan pengusaha** | **100%** | **100% (target = 1750+350+100)** |  **5.545.000.000**  | **100% (target = 1750+350+100)** |  **7.208.500.000**  | **100% (target = 1500+300+100)** |  **9.371.050.000**  | **100% (target = 1000+100)** |  **12.182.365.000**  | **100% (target = 1000+100)** |  **15.837.074.500**  | **5000** |  **50.143.989.500**  |
| Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data | Jumlah Dokumen Pemutakhiran Data | 1 Dokumen  | 2 Dokumen |  450.000.000  | 2 Dokumen |  585.000.000  | 2 Dokumen |  760.500.000  | 2 Dokumen |  988.650.000  | 2 Dokumen |  1.285.245.000  |   |  4.069.395.000  |
| Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Peserta | Jumlah Peserta | N.A | 225 |  200.000.000  | 225 |  260.000.000  | 225 |  338.000.000  | 225 |  439.400.000  | 225 |  571.220.000  |   |  1.808.620.000  |
| Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro | Jumlah Produk yang Tersertifikasi  | Jumlah Produk yang Tersertifikasi  | 490 | 300 |  450.000.000  | 300 |  585.000.000  | 300 |  760.500.000  | 300 |  988.650.000  | 300 |  1.285.245.000  | 1500 |  4.069.395.000  |
| Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah peserta  | Jumlah peserta Terbina | 100 | 2400 |  4.245.000.000  | 2400 |  5.518.500.000  | 2150 |  7.174.050.000  | 1100 |  9.326.265.000  | 1100 |  12.124.144.500  |   |  38.387.959.500  |
| Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah usaha mikro | Jumlah usaha mikro | N.A | 500 |  200.000.000  | 500 |  260.000.000  | 500 |  338.000.000  | 500 |  439.400.000  | 500 |  571.220.000  |   |  1.808.620.000  |
| **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **Persentase Usaha Mikro Binaan yang Naik Omzet** | **Jumlah usaha mikro naik Omset dibagi dengan Target wirausaha baru sampai dengan akhir periode (8.570 usaha mikro)** | **2,0%** | **7,7%** |  **6.366.000.000**  | **13,0%** |  **6.516.000.000**  | **17,6%** |  **6.666.000.000**  | **17,6%** |  **6.681.000.000**  | **17,6%** |  **6.831.000.000**  | **17,6%** |  **33.060.000.000**  |
| **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** | **Persentase UMKM yang terbina** | **Persentase UMKM yang terbina (UMKM yang lolos kurasi)data dasar : 8.570** | **N.A** | **20%** |  **6.366.000.000**  | **20%** |  **6.516.000.000**  | **20%** |  **6.666.000.000**  | **20%** |  6.681.000.000  | **20%** |  6.831.000.000  | **20%** |  33.060.000.000  |
| Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi | Jumlah pelaku UMKM | Jumlah pelaku UMKM dibina | N.A | 2100 |  6.366.000.000  | 2100 |  6.516.000.000  | 1800 |  6.666.000.000  | 500 |  6.681.000.000  | 500 |  6.831.000.000  |  7.000  |  33.060.000.000  |
| Jumlah peserta | Jumlah peserta Pelatihan (Kemasan Produk, digtal marketing, manajemen usaha) | 60 | 1050 |   | 1050 |   | 1050 |   | 1050 |   | 1050 |   |  5.250  |   |
| Jumlah Promosi | Jumlah Promosi/Event Gelar Akbar dan pameran | 5 | 8 |   | 8 |   | 8 |   | 8 |   | 8 |   |  45  |   |

**BAB VII**

**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok mendukung tercapainya tujuan untuk meningkatkan presentase koperasi aktif, meningkatkan volume usaha koperasi, meningkatkan persentase usaha mikro naik kelas dan meningkatkan persentase wirausaha baru.

Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Depok tahun 2021-2026.

**Tabel 7.1: Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah** | **Kondisi Kinerja Awal (2020)** | **CAPAIAN KINERJA SASARAN** | **Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD** |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Persentase koperasi aktif** | **34,70%** | 81,80% | 84,80% | 87,90% | 90,90% | 93,90% | 93,90% |

**Tabel 7.2: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN RENSTRA** | **INDIKATOR SASARAN** | **FORMULASI** | **CAPAIAN KINERJA SASARAN** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan yang Akutabel** | **Nilai evaluasi AKIP DKUM** | **Penilaian Inspektorat Daerah/ Menpan RB** | **70.10** | **70.15** | **70.20** | **70.30** | **70.40** | **70.50** |
| **Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro** | **Koperasi Berkualitas** | **Jumlah koperasi berkualitas dibagi total jumlah koperasi** | **15%** | **18%** | **21%** | **24%** | **27%** | **30%** |
| **Persentase wirausaha** | **Jumlah usia penduduk produktif Kota Depok yang berwirausaha dibagi dengan total jumlah usia produktif Kota Depok** | **2%** | **2%** | **2%**  | **2%** | **2%** | **2%** |

**Pemetaan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

**yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026**

Peningkatan kualitas SDM dan ekonomi Daya Saing Daerah yang Dicirikan oleh Tingginya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi yang Ditopang oleh Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif

**ISU STRATEGIS**

MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING

**MISI**

**TUJUAN**

**RPJMD**

TERCIPTANYA PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA YANG MAJU, BERDAYA SAING DAN MANDIRI

**Laju Pertumbuhan Ekonomi**

**INDIKATOR**

**TUJUAN**

**Indeks Gini**

**MENINGKATNYA PERTUMBUHAN**

**EKONOMI**

**MENINGKATKAN**

 **KESEMPATAN**

**KERJA**

**SASARAN**

**STRATEGIS**

**RPJMD**

**Konsumsi rumah tangga**

 **(perkapita)**

**INDIKATOR**

 **SASARAN**

 **RPJMD**

**Tingkat**

**Pengangguran**

**Terbuka**

**Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi dan UMKM**

**INDIKATOR**

 **TUJUAN PD**

**KOPERASI**

**BERKUALITAS**

**PERSENTASE**

**WIRAUSAHA**

**PERSENTASE**

**WIRAUSAHA**

**INDIKATOR**

 **SASARAN**

**PD**

**Program**

**Pemberdayaan Usaha**

**Menengah, Usaha**

**Kecil, Dan Usaha**

**Mikro (Umkm)**

**PROGRAM**

 **(PERMENDAGRI 90)**

**PROGRAM**

**PENGEMBANGAN**

**UMKM**

1. **Program Pelayanan Izin**

**Usaha Simpan Pinjam**

1. **Program Pengawasan Dan**

**Pemeriksaan Koperasi**

1. **Program Penilaian**

**Kesehatan Ksp/Usp Koperasi**

1. **Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**
2. **Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**

**BAB VIII**

**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) mengandung tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026 juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Dinas, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas maupun di lingkup Pemerintah Kota Depok.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kota Depok Tahun 2021-2026 yaitu, ***“Kota Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera”.***